



LAPORAN KINERJA

Tahun 2019



BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Surabaya, Januari 2020

KATA PENGANTAR

Puja Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kekuatan dan kemampuan kepada kami, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur dapat diselesaikan tepat waktu. LKjIP Tahun 2019 ini merupakan gambaran tentang realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019.

LKjIP ini disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Review Atas Laporan Kinerja, LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga diharapkan mampu menjadi tolak ukur dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada periode berikutnya.

Tahun 2019, merupakan tahun kedua implementasi Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dan tahun terakhir pada periode Renstra 2014-2019, hal ini disebabkan terjadinya perubahan struktur organisasi dan tugas serta fungsi Biro Humas dan Protokol, sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan struktur organisasi tersebut berdampak pada perubahan struktur fungsi, sebelumnya Biro Humas dan Protokol hanya memiliki 2 (dua) fungsi yaitu Fungsi Kehumasan dan Fungsi Keprotokolan. Sedangkan berdasarkan Perda Jawa Timur 11/2016, fungsi Biro Humas dan Protokol bertambah satu, yaitu Fungsi Administrasi Kerjasama.

Kinerja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur difokuskan pada satu sasaran, yaitu Meningkatnya Layanan

Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama. Guna mencapai sasaran dimaksud, Biro Humas dan Protokol menjabarkannya kedalam 8 (delapan) program dan 21 kegiatan.

Menyadari akan keterbatasan-keterbatasan yang ada, sangat dimungkinkan laporan yang telah disusun ini masih terdapat banyak kekurangan dan dibutuhkan koreksi serta perbaikan dari berbagai pihak guna penyempurnaan lebih lanjut. Dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan serta memberikan masukan balik bagi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Pengembangan Kehumasan dan Keprotokolan.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan buku laporan ini.

Surabaya, 3 Pebruari 2020



Plt. Kepala Biro Humas Dan Protokol

ARIES AGUNG PAEWAI, S.STP, MM.

Pembina Tk.I

NIP. 19760417 199511 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi	2
C. Kondisi Biro Humas Dan Protokol	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014-2019 .	18
B. Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur	20
C. Tujuan dan Sasaran Biro Humas dan Protokol	22
D. Strategi dan Kebijakan	25
E. Rencana Kinerja Tahun 2019	26
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019	35
B. Evaluasi Dan Analisa Capaian Kinerja	38
1. Analisa Capaian Kinerja Indikator 1	38
2. Analisa Capaian Kinerja Indikator 2	46
3. Analisa Capaian Kinerja Indikator 3	61
4. Analisa Capaian Kinerja Indikator 4	67
C. Akuntabilitas Keuangan	70
1. Pengelolaan Keuangan Daerah	70
2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019	71
BAB IV P E N U T U P	79

Lampiran – Lampiran

Lampiran 1 : Matrik Renstra

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Lampiran 3 : Pengukuran Kinerja 2019

Lampiran 4 : Kuesioner dan Tabulasi IKM

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 : Matriks Hubungan Antara Visi, Misi dan Tujuan	20
Tabel 2.2 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	22
Tabel 3.1 : Pencapaian Kinerja Tahun 2018.....	28
Tabel 3.2 : Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2017 dan 2019..	28
Tabel 3.3 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Perubahan Renstra 2014-2019	29
Tabel 3.4 : Capaian Kinerja Indikator 1.1	32
Tabel 3.5 : Capaian Kinerja Indikator 1.2.....	36
Tabel 3.6 : Tabulasi dan Perhitungan IKM Hasil Kuesioner 1.2.....	36
Tabel 3.7 : Media Partner Biro Humas dan Protokol.....	38
Tabel 3.8 : Capaian Kinerja Indikator 1.3.....	42
Tabel 3.9 : Distribusi Berita Kegiatan Gub, Wagub dan Sekda.....	42
Tabel 3.10 : Distribusi Produk Informasi Biro Humas dan Protokol .	44
Tabel 3.11 : Capaian Kinerja Indikator 1.4.....	45
Tabel 3.12 : Profil Responden IKM Indikator 1.4.....	46
Tabel 3.13 : Tabulasi dan Perhitungan IKM Kuesioner Indikator 1.4	46
Tabel 3.14 : Capaian Kinerja Indikator 1.5.....	48
Tabel 3.15 : Jumlah Kegiatan Gubernur, Wagub dan Sekda Th 2019	49
Tabel 3.16 : Jumlah Kunjungan Tamu Kenegaraan Tahun 2019.....	49
Tabel 3.17 : Tabulasi dan Perhitungan IKM Hasil Kuesioner 1.5.....	50
Tabel 3.18 : Capaian Kinerja Indikator 1.6.....	51
Tabel 3.19 : Jumlah Tindak Lanjut Dokumen Administrasi Kerjasama	52
Tabel 3.20 : Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja TA 2019.....	74
Tabel 3.21 : Alokasi Anggaran Per Kegiatan IKU TA 2019	75
Tabel 3.22 : Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019	76
Tabel 3.22 : Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019	77
Tabel 3.23 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	77

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 disusun sebagai implementasi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah termasuk Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Biro Humas dan Protokol telah mengimplementasikan Perubahan Rencana Strategis 2014-2019 kedalam satu Sasaran, yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama. Pada tahun 2017, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan struktur organisasi, Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016, fungsi Biro Humas dan Protokol bertambah satu sehingga menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu Fungsi Kehumasan, Keprotokolan dan Administrasi Kerjasama.

Kemudian sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, Sasaran tersebut diukur dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama. Pada tahun 2019 capaian kinerja yang dihasilkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama	Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluarkan (%)	80%	81.30%	101,62%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi (IKM)	IKM 99	98,82	99,82%

	Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan (IKM)	IKM 97	95,65	98.60%
	Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti (%)	80%	94,44%	118.05 %
Rata-Rata				104.52%

Guna mencapai target Indikator Kinerja Utama tersebut, Biro Humas dan Protokol melaksanakan 8 (delapan) Program, yaitu : (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; (3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah; (4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan; (5) Program Peningkatan Kualitas Ketersediaan Informasi; (6) Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyebarluasan Informasi; (7) Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kerjasama; dan (8) Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan.

Dalam pelaksanaan upaya pencapaian target indikator kinerja utama tersebut terdapat beberapa kendala dan permasalahan yaitu dalam bidang penyebarluasan informasi masih adanya ketidaksamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan media massa dalam mempublikasikan kegiatan pimpinan daerah. Sementara itu untuk kegiatan Keprotokolan, kunjungan tamu VVIP dan VIP intensitasnya sulit diprediksi. Sedangkan pada bidang kelembagaan, nomenklatur dan kelembagaan Humas dan Protokol yang tidak sama antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi, sehingga menyulitkan dalam koordinasi. Sedangkan untuk fungsi kerjasama, dikarenakan fungsi kerjasama merupakan fungsi baru yang ditambahkan pada tahun 2017, sehingga dalam pelaksanaannya di tahun 2018 dan 2019 masih mengalami kendala khususnya dalam penganggaran.

Langkah-langkah dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan selalu melakukan koordinasi, baik dengan Perusahaan Media dalam penyebarluasan informasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur

dan Sekretaris Daerah maupun dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan acara Kunjungan Kerja Kepala Daerah, maupun fasilitasi kunjungan kerja pejabat negara lainnya, serta melakukan sinkronisasi teknis penganggaran dan penyesuaian kebutuhan dalam menjalankan fungsi administrasi kerjasama.

BAB I

PENDAHULUAN

Arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019 mengisyaratkan bahwa permasalahan pokok yang terdapat di provinsi Jawa Timur adalah pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, percepatan ekonomi dan pemerataannya, sumber daya alam dan lingkungan, stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat serta keterbatasan sumber penerimaan daerah.

Sejalan dengan arah dan kebijakan umum yang telah di tetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, Biro Humas dan Protokol sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2018, melaksanakan berbagai program yang mendukung penyebaran informasi keberhasilan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi permasalahan pokok pembangunan.

A. LATAR BELAKANG

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai peran penting dalam menjalin dan menjaga hubungan baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lain serta menyebarkan informasi kebijakan program pembangunan dalam upaya mewujudkan visi dan visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dengan peran tersebut, diharapkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan terbesar di Jawa Timur menjadi masyarakat yang kritis dan “*melek informasi*”. Makin kritisnya masyarakat terhadap terhadap visi, misi, program pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh Kepala Daerah menjadi bagian terpenting dalam penentuan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Guna mewujudkan cita-cita tersebut, maka diperlukan komunikasi yang intensif dan aktif dari para pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat untuk menjaga konsistensi kebijakan, program pembangunan, efektifitas dan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Biro Humas dan Protokol mengemban tugas untuk meningkatkan dan menjaga sistem hubungan komunikasi antara

Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya agar tetap terjalin dengan baik, meningkatkan citra yang baik di mata masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi, terutama dari aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Disamping itu Biro Humas dan Protokol juga bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan protokoler resmi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pejabat/Tamu Negara yang datang menjadi tamu Pemerintah provinsi Jawa Timur. Biro Humas dan Protokol sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program pembangunan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, membangun citra baik Pemerintah Daerah dan menjaga hubungan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Biro Humas dan Protokol dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Asisten, Biro, Bagian dan Sub Bagian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2011, struktur organisasi dan tata kelola Biro Humas dan Protokol berubah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Timur; dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan fungsi Asisten, Biro, Bagian dan Sub Bagian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan pada tahun 2017, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur kembali mengalami perubahan struktur organisasi, sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan struktur organisasi tersebut berdampak pada perubahan struktur fungsi, sebelumnya Biro Humas dan Protokol hanya memiliki 2

(dua) fungsi yaitu Fungsi Kehumasan dan Fungsi Keprotokolan. Sedangkan berdasarkan Perda Jawa Timur 11/2016, fungsi Biro Humas dan Protokol bertambah satu, yaitu Fungsi Administrasi Kerjasama.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Humas dan Protokol memiliki tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang hubungan masyarakat, tugas-tugas keprotokolan dan administrasi kerjasama.

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan Juru Bicara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
2. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat, protokol dan administrasi kerjasama;
3. pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pengumpulan dan penyaringan informasi, media, dokumentasi, protokol dan administrasi kerjasama;
4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengumpulan dan penyaringan informasi, media, dokumentasi, protokol dan administrasi kerjasama;
5. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang hubungan masyarakat, protokol dan administrasi kerjasama; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.

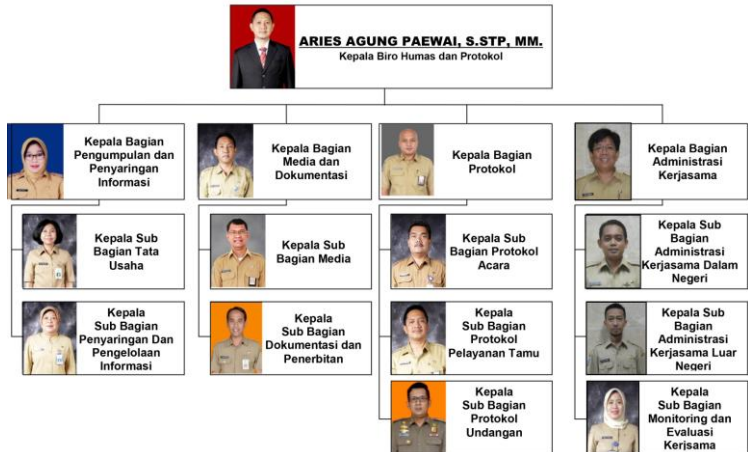
C. KONDISI BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

1. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan tata kelola Biro Humas dan Protokol tersusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUMAS DAN PROTOKOL



2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Humas dan Protokol memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

- a. **BAGIAN PENGUMPULAN DAN PENYARINGAN INFORMASI**
 - TUGAS : menyiapkan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pengumpulan, penyaringan data dan informasi serta melaksanakan urusan tata usaha.
 - FUNGSI :
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja Biro;
 - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis tentang pengumpulan dan penyaringan informasi;
 - c. pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan penyaringan informasi;
 - d. pelaksanaan monitoring dan analisis pemberitaan media sebagai bahan pengambilan keputusan;

- e. pelaksanaan penyusunan pusat data informasi kehumasan dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengumpulan dan penyaringan informasi; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi mempunyai 2 (dua) sub bagian yang terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Penyaringan dan Pengelolaan Informasi, dengan tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang pengumpulan dan penyaringan informasi;
- b. menyiapkan bahan monitoring pemberitaan media ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi pengumpulan dan penyaringan informasi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis pemberitaan media;
- e. menyiapkan bahan konfirmasi bagi pimpinan atas pemberitaan media;
- f. menyiapkan bahan penyusunan pusat data informasi kehumasan dan keprotokolan;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengumpulan dan penyaringan informasi; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

1.2 Sub Bagian Tata Usaha dengan Tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengumpulan, penyaringan dan analisa data informasi yang berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat umum dan organisasi non Pemerintah yang

- menyangkut bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan analisa dan kliping pemberitaan di surat kabar / majalah mengenai umpan balik masyarakat terhadap kebijaksanaan pimpinan di bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan kebijaksanaan selanjutnya;
 - c. Menyiapkan pengumpulan dan penyimpanan data/informasi untuk bahan konfirmasi tentang berita ataupun isu yang beredar di masyarakat guna bahan tanggapan, untuk dipublikasikan maupun sebagai bahan penelitian yang menyangkut bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

b. BAGIAN MEDIA DAN DOKUMENTASI

- TUGAS : menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang media dan dokumentasi.
- FUNGSI :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyiapan materi untuk siaran pers dan media massa;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dengan media massa;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyebarluasan informasi dan sosialisasi kebijakan Pemerintah Provinsi melalui media massa;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan pembinaan, petunjuk pelaksanaan dan perumusan kebijakan di bidang media, dokumentasi dan penerbitan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian media dan dokumentasi; dan

- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Bagian Media dan Dokumentasi mempunyai 2 (dua) sub bagian yang terdiri dari :

2.1 Sub Bagian Media, dengan tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang media;
- b. menyiapkan bahan koordinasi bidang media;
- c. menyiapkan bahan siaran pers melalui media massa;
- d. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama dengan pengelola media massa;
- e. menyiapkan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah bidang media;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang media; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian..

2.2 Sub Bagian Dokumentasi dan Penerbitan, dengan tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang dokumentasi dan penerbitan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi bidang dokumentasi dan penerbitan;
- c. menyiapkan dan menyebarluaskan dokumentasi untuk bahan pemberitaan;
- d. menyiapkan, memelihara peralatan dan hasil dokumentasi;
- e. menyiapkan bahan sambutan dan presentasi bagi pimpinan daerah;
- f. menyiapkan dan menerbitkan informasi melalui penerbitan internal;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan distribusi penerbitan internal;

- h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang dokumentasi dan penerbitan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

c. BAGIAN PROTOKOL

- TUGAS : menyiapkan, mengkoordinasikan, mengatur dan merencanakan pelaksanaan kebijakan pelayanan keprotokolan bagi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, tata upacara, tata acara resmi, tata penghormatan, tata pelayanan tamu dan urusan undangan.
- FUNGSI :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain di bidang pelayanan keprotokolan di setiap acara resmi dan acara kenegaraan;
 - b. pelaksanaan penyiapan dan pengaturan, serta penataan acara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
 - c. pelaksanaan penyiapan, pengaturan, penataan dan kelancaran kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi ;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pengaturan serta pelayanan acara penerimaan kunjungan tamu Pemerintah, Pejabat Negara dan Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia serta tamu negara/VVIP lainnya;
 - e. pelaksanaan pelayanan keprotokolan kepada instansi pemerintah/non pemerintah di setiap acara resmi dan acara kenegaraan yang ada di Provinsi;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian protokol; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro..

Bagian Protokol mempunyai 3 (tiga) sub bagian yang terdiri dari :

3.1 Sub Bagian Protokol Acara, dengan tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat koordinasi keprotokolan dalam rangka kesiapan dan pemantapan acara resmi/upacara yang dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan menyiapkan perlengkapan, kelengkapan acara, mengatur, menata ruangan dan tempat pelaksanaan kegiatan acara resmi/upacara;
- c. menyiapkan pengaturan dan penataan pelaksanaan gladi acara resmi/upacara yang akan dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- d. menyiapkan bahan laporan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah berupa Standar Operasional Prosedur Protokol (SOPP) pada setiap acara resmi/upacara;
- e. menyiapkan bahan koordinasi teknis pelaksanaan acara resmi/upacara sesuai SOPP dengan para sekretaris pribadi/ajudan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengarsipan seluruh jadwal kegiatan dan SOPP acara resmi/upacara yang dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

3.2 Sub Bagian Protokol Pelayanan Tamu, dengan tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat koordinasi keprotokolan dalam rangka pemantapan kesiapan acara penerimaan

- kunjungan kerja pejabat negara, pemerintah dan Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia serta tamu kehormatan Provinsi;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyiapan keperluan dan kelengkapan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara, pemerintah dan Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia serta tamu kehormatan Provinsi;
 - c. menyiapkan dan menyusun serta melaporkan bahan rencana agenda kunjungan kerja pejabat negara, pemerintah dan Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia dan Tamu Kehormatan di Jawa Timur dalam bentuk SOPP/buku panduan;
 - d. menyiapkan jasa pengamanan bagi kunjungan kerja pejabat negara, pemerintah dan tamu kehormatan serta VVIP selama kunjungan kerja di Jawa Timur;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pendampingan kepada protokol pejabat negara, pemerintah, Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia dan tamu kehormatan dalam rangka kunjungan kerja/resmi di Jawa Timur;
 - f. menyiapkan petugas protokol yang melekat di setiap
 - g. kunjungan kerja/resmi pejabat negara, pemerintah, Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia serta tamu kehormatan selama di Jawa Timur;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengarsipan seluruh jadwal kegiatan dan SOPP acara kunjungan kerja/resmi pejabat negara, pemerintah, Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia serta tamu kehormatan di Jawa Timur; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

3.3 Sub Bagian Protokol Undangan, dengan tugas :

- a. menyiapkan dan memproses undangan kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta Tamu Negara/tamu resmi dan Pejabat Negara/Pemerintah lainnya;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan panitia pelaksana acara untuk rancangan daftar yang diundang dan proses penyiapan undangan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak keprotokolan negara dan pihak pengamanan terkait dengan legalitas undangan tamu negara;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pendistribusian dan monitoring pengiriman undangan serta kehadiran pejabat yang diundang;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan dan pembaruan data nama dan alamat dinas para pejabat/para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dianggap perlu;
- f. menyiapkan undangan rutin, undangan rapat paripurna, rapat komisi DPRD, senam kesegaran jasmani, apel rutin, upacara hari besar nasional dan acara resmi lainnya di lingkungan Provinsi;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengarsipan undangan yang telah dicetak dan yang telah didistribusikan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian.

d. BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA

- TUGAS : menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan,

teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah.

➤ FUNGSI :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang- bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- b. penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang- bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- d. perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelesaian perselisihan kerjasama antar Pemerintah Provinsi, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dengan provinsi lain dan dengan lembaga dalam negeri;
- e. pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta pimpinan/anggota DPRD;
- f. pelaksanaan fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, pimpinan/anggota DPRD, Bupati/Walikota dan pimpinan/anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Bagian Administrasi Kerjasama mempunyai 3 (tiga) sub bagian yang terdiri dari :

4.1 Sub Bagian Administrasi Kerjasama Dalam Negeri, dengan tugas :

- a. menyiapkan bahan analisis data kerjasama antar Pemerintah Provinsi, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dengan provinsi lain dan dengan lembaga dalam negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama antar Pemerintah Provinsi, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dengan provinsi lain dan dengan lembaga dalam negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Provinsi, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dengan provinsi lain dan dengan lembaga dalam negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang- bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Provinsi, dengan Pemerintah
- e. Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dengan provinsi lain dan dengan lembaga dalam negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah;

- f. menyiapkan bahan perumusan perjanjian kerjasama antar Pemerintah Provinsi, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dengan provinsi lain dan dengan lembaga dalam negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- g. menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan penyelesaian perselisihan kerjasama antar Pemerintah Provinsi, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dengan provinsi lain dan dengan lembaga dalam negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

4.2 Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri, dengan tugas:

- a. menyiapkan bahan analisis data kerjasama luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang- bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi,

- d. sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang- bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- f. menyiapkan bahan perumusan perjanjian kerjasama luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang- bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi perjalanan dinas luar negeri Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta pimpinan/anggota DPRD;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, pimpinan/anggota DPRD, Bupati/Walikota dan pimpinan/anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

4.3 Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Kerjasama, dengan tugas :

- a. menyiapkan bahan pengolahan data kerjasama daerah dalam dan luar negeri;
- b. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kerjasama daerah dalam dan luar negeri;
- c. menyiapkan bahan pengendalian dan perumusan data hasil kerjasama daerah dalam dan luar negeri;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota;

- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil evaluasi kerjasama daerah dalam dan luar negeri; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

3. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Biro Humas dan Protokol Jawa Timur didukung oleh 72 pegawai dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21 pegawai dari unsur Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK). Dengan sebaran kondisi sampai dengan Desember 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah PNS Berdasar Golongan Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Tk.I	IV/b	4
2	Pembina	IV/a	10
3	Penata Tk.I	III/d	11
4	Penata	III/c	10
5	Penata Muda Tk.I	III/b	24
6	Penata Muda	III/a	10
7	Pengatur Tk.I	II/d	1
8	Pengatur	II/c	1
JUMLAH PNS			72

b. Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 2 (S.2)	19
2	Strata 1 (S.1)	42
3	SMA	11
JUMLAH PNS		72

c. Jumlah PNS Berdasarkan Usia

No	USIA	Jumlah
1	< 30	10
2	31 - 40	20
3	41 - 50	22
4	50 - 55	11
5	> 55	10
Total		72

d. Jumlah PTT-PK Tahun 2019 Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 1 (S.1)	12
2	Diploma III (D-III)	1
3	SMA	8
JUMLAH PNS		21

e. Jumlah PTT-PK Tahun 2019 Berdasarkan Usia

No	USIA	Jumlah
2	25 - 35	17
3	36 - 45	4
Total		21

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2019

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Biro Humas dan Protokol Setda Prov Jatim Tahun 2014-2019 berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang Serta

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik. di Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Humas dan Protokol disusun berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dan merupakan penjabaran dari Misi ke 4 Pemerintah Provinsi Jawa Timur “Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik”. Maksud penyusunan Renstra ini adalah memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemangku jabatan dalam bidang Kehumasan dan Keprotokolan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terpadu dan berkesinambungan.

Pada tahun 2017, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan struktur organisasi, sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan struktur organisasi tersebut berdampak pada perubahan struktur fungsi, sebelumnya Biro Humas dan Protokol hanya memiliki 2 (dua) fungsi yaitu Fungsi Kehumasan dan Fungsi Keprotokolan. Sedangkan berdasarkan Perda Jawa Timur 11/2016, fungsi Biro Humas dan Protokol bertambah satu, yaitu Fungsi Administrasi Kerjasama.

Atas dasar perubahan fungsi tersebut, Renstra 2017-2019 Biro Humas dan Protokol dilakukan review untuk pelaksanaan tahun 2017 dengan menambahkan satu Indikator Kinerja Utama Baru (Indikator 5) yaitu : Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti. Untuk melaksanakan Indikator 5 tersebut ditambahkan juga program baru yaitu : Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kerjasama.

B. VISI dan MISI GUBERNUR JAWA TIMUR

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Jawa Timur serta mempertimbangkan budaya masyarakat Jawa Timur, maka visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 adalah:

**“JAWA TIMUR LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI,
BERDAYA SAING, DAN BERAKHLAK “**

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan adanya perencanaan program yang baik sebagai penjabaran dari visi Gubernur tersebut. Sehingga perlu disusun perencanaan yang baik dan didukung oleh data/informasi yang tepat. Oleh karena itu Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur mempunyai peran strategis sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi serta melaksanakan komunikasi publik kepada masyarakat;

- c. Meningkatkan kualitas Pelayanan Keprotokolan bagi Pimpinan, Pejabat Negara dan Tamu Kenegaraan yang berkunjung ke Jawa Timur;
- d. Meningkatkan Kualitas Administrasi Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak-pihak dalam maupun luar negeri.

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat 13 UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, Misi Gubernur Jawa Timur dijabarkan sebagai berikut :

- a. Misi Pertama : Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
- b. Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.
- c. Misi Ketiga : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.
- d. Misi Keempat : Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
- e. Misi Kelima : Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur

memiliki tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang hubungan masyarakat, tugas-tugas keprotokolan dan administrasi kerjasama. Adapun Biro Humas dan Protokol mendukung Misi Keempat Gubernur Jawa Timur dalam Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Guna menjangkau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta memberikan pelayanan publik, baik kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah maupun masyarakat umum, maka Biro Humas dan Protokol menentukan tujuan dan sasaran strategis dengan maksud sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan informasi berupa agenda dan berita Kegiatan Pejabat (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah) kepada publik yang memerlukan.
- b. Memberikan layanan informasi potensi dan hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa berita yang dimuat di media massa, cetak dan elektronik, penerbitan buletin, buku, foto untuk disampaikan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah/ Pusat serta pihak yang memerlukan informasi.
- c. Memberikan pelayanan keprotokolan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata acara resmi kenegaraan.
- d. Memberikan pelayanan administrasi kerjasama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

C. TUJUAN DAN SASARAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, Penelaahan Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Maka, Biro

Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki 1 (satu) Tujuan dan 1 (satu) sasaran.

- a. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama.
- b. Sasaran : Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama.

Sasaran sebagaimana dimaksud memiliki lima indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluarkan (%)
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi (IKM)
3. Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan (IKM)
4. Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti (%)

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2014–2019) juga telah disesuaikan dengan adanya penambahan fungsi kerjasama dan telah dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu : Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama.

Tabel : 2.1 Matriks Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran PD				
					2015 (Baseline)	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama	Persentase Peningkatan Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama	Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama	Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluarkan (%)	-	-	70	75	80
				Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi (IKM)	97	97	98	98	99
				Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan (IKM)	88	90	92	95	97
				Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti (%)	-	-	70	75	80

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka perlu disusun strategi dan kebijakan. Dengan demikian maka diharapkan akan terwujud kinerja lembaga yang optimal dengan melalui proses yang sistematis dan terencana. Strategi dan kebijakan disusun berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT, sehingga upaya-upaya yang dilakukan mampu menanggulangi dan memecahkan berbagai permasalahan yang mungkin muncul.

1. Strategi

Sesuai dengan hasil analisis kondisi internal dan eksternal Biro Humas dan Protokol, Strategi Biro Humas dan Protokol dapat dipetakan menjadi 6 (enam) yaitu:

- a. Melakukan perencanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai;
- b. Meningkatkan ketersediaan dan layanan informasi untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dan masyarakat umum;
- c. Memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai pusat layanan informasi kehumasan;
- d. Menjaga hubungan baik dengan perusahaan pers sebagai upaya meningkatkan kualitas dan penyebarluasan informasi;
- e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Kunjungan Kerja Pejabat Negara;
- f. Meningkatkan Kualitas Administrasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri serta Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama.

2. Kebijakan

Guna menjalankan strategi tersebut, Biro Humas dan Protokol merumuskan beberapa Kebijakan dasar sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana;
- c. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan;

- d. Membangun sistem informasi penilaian SKP;
- e. Meningkatkan kuantitas hasil monitoring media cetak;
- f. Mengembangkan website portal berita kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
- g. Membangun website Pusat Database Informasi Kebijakan Gubernur Jawa Timur;
- h. Menyelenggarakan Pers Gathering, Editor Gathering, Pers Tour dan Lomba Karya Tulis Wartawan (LKTW);
- i. Melakukan Koordinasi intensif dengan bagian kehumasan kabupaten/kota se-Jawa Timur;
- j. Memberikan Pelayanan Keprotokolan dan Fasilitas Kunjungan Kerja Pejabat Negara ke Jawa Timur;
- k. Melakukan Koordinasi Intensif dengan bagian Keprotokolan dan Kerjasama kabupaten/ kota se-Jawa Timur.

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan baik untuk Kementrian / Lembaga di Pusat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2019 Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur terdiri dari 8 (Delapan) Program dan 21 Kegiatan dengan matriks sebagaimana dalam tabel 2.2 berikut :

TABEL 2.2 : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BIRO HUMAS DAN PROTOKOL TAHUN 2019

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokol dan Kerjasama	Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluarkan (%)	65 %	1.1 Program Peningkatan Kualitas Ketersediaan Informasi	1.1.1 Monitoring Media Massa dan Penyebarluasan hasil Analisis Berita dan Isu Publik Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Input : Dana Dibutuhkan	Rp	1.496.000.000	
					Output : Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Isu Publik Media Cetak	Buku Dokumen	1752	
					Outcome: Persentase Berita dan Isu Publik Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang di Monitoring dan Diolah	%	100	
				1.1.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data/Informasi Pendukung Kebijakan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	Input : Dana Dibutuhkan	Rp	1.331.000.000	
					Output : Jumlah Data dan Informasi Kehumasan yang tersusun	Data	6232	
					Outcome: Persentase Berita dan Isu Publik Pemerintahan	%	100	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Provinsi Jawa Timur yang di Monitoring dan Diolah			
				1.1.3 Monitoring dan Evaluasi SDM Kehumasan dan Keprotokolanan	Input : Dana Dibutuhkan	Rp	665.500.000	
					Output : Jumlah Peserta yang Mengikuti Rakor Kehumasan dan Peningkatan SDM	Orang	240	
					Outcome: Persentase Berita dan Isu Publik Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang di Monitoring dan Diolah	%	100	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi (IKM)	IKM = 98	1.2 Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi	1.2.1 Penyebarluasan Informasi Kebijakan dan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	Input : Dana Dibutuhkan	Rp	1.680.620.600	
					Output : Jumlah Siaran Pers yang dirilis	Berita	800	
					Outcome: Persentase Tersebarluasnya Informasi kepada Masyarakat	%	100	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				Ket.	
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				1.2.2	Pembinaan Kerjasama dengan Lembaga Pers	<i>Input</i> : Dana Dibutuhkan <i>Output</i> : Jumlah Perusahaan/Lemba ga Pers yang Menjalin Kerjasama dengan Biro Humas dan Protokol <i>Outcome</i> : Persentase Tersebarluasnya Informasi kepada Masyarakat	Rp	2.396.735.400	
				1.2.3	Pendokumenta sian Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta Olah Konten Multimedia	<i>Input</i> : Dana Dibutuhkan <i>Output</i> : Jumlah Hasil Olah Konten Dokumentasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah <i>Outcome</i> : Persentase Tersebarluasnya Informasi kepada Masyarakat	Rp	3.149.050.170	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				Ket.	
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				1.2.4	Penerbitan dan Penyebarluasan Produk Informasi/Dokumentasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	<p><i>Input</i> : Dana Dibutuhkan</p> <p><i>Output</i> : Jumlah Produk Informasi/Dokumentasi yang Diterbitkan dan Disebarluaskan</p> <p><i>Outcome</i>: Persentase Tersebarluasnya Informasi kepada Masyarakat</p>	<p>Rp</p> <p>Produk</p> <p>%</p>	<p>1.320.967.560</p> <p>5</p> <p>100</p>	
	Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan (IKM)	IKM = 90	1.3 Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	2.1.1	Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	<p><i>Input</i> : Dana Dibutuhkan</p> <p><i>Output</i> : Jumlah Pelayanan Keprotokolan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah</p> <p><i>Outcome</i>: Persentase Layanan Keprotokolan</p>	<p>Rp</p> <p>Kegiatan</p> <p>%</p>	<p>2.500.000.000</p> <p>730</p> <p>100</p>	
				2.1.2	Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat	<p><i>Input</i> : Dana Dibutuhkan</p> <p><i>Output</i> : Jumlah Pelayanan</p>	<p>Rp</p> <p>Kegiatan</p>	<p>1.600.000.000</p> <p>180</p>	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu Negara	Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu Negara			
					Outcome: Persentase Layanan Keprotokolan	%	100	
				Pelayanan Penerbitan Undangan Resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokolan	Input : Dana Dibutuhkan	Rp	1.250.000.000	
					Output : Jumlah Permintaan Undangan Resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokolan yang terpenuhi	Undangan	850	
					Outcome: Persentase Layanan Keprotokolan	%	100	
				Persentase Kesepakatan dan Perjanjian	70%	1.4 Program Peningkatan	Kerjasama antar Daerah dengan Luar Negeri	Input : Dana Dibutuhkan
Output : Jumlah Dokumen	Dokumen	60						

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kerjasama yang ditindaklanjuti (%)		Kuantitas dan Kualitas Administrasi Kerjasama		Kerjasama Luar Negeri yang tersusun			
					<i>Outcome</i> : Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang didokumentasikan	%	100	
				Fasilitasi Kerjasama antar Kabupaten/Kota, Provinsi dengan Kabupaten/Kota, Antar Provinsi, Provinsi dengan Lembaga	<i>Input</i> : Dana Dibutuhkan	Rp	2.706.630.000	
					<i>Output</i> : Jumlah Dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang tersusun	Dokumen	42	
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Administrasi	<i>Outcome</i> : Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang didokumentasikan	%	100		
				<i>Input</i> : Dana Dibutuhkan	Rp	1.888.414.000		
			<i>Output</i> : Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	75			

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kerjasama	Evaluasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri			
					Outcome : Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang didokumentasikan	%	100	

F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2019 menjadi tumpuan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan kinerja *Output* ataupun *Outcome* yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja yang menjadikan komitmen kinerja Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov Jatim dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran Perjanjian Kinerja Biro Humas dan Protokol Setda Prov Jatim Tahun 2019.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 tertuang bahwa Biro Humas dan Protokol melaksanakan 8 (delapan) Program sebagai berikut :

Program Administratif

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Program Pembangunan

5. Program Peningkatan Kualitas Ketersediaan Informasi
6. Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi
7. Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
8. Program Peningkatan Kerjasama.

Adapun anggaran pelaksanaan program-program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 55.902.899.000,-**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, juga tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance imProvinsiement*).

Tabel 3.1 : Pencapaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolanan dan Kerjasama	Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluarkan (%)	80%	81.30%	101,62%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi (IKM)	IKM 99	98,82	99,82%
	Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolanan (IKM)	IKM 97	95,65	98.60%
	Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti (%)	80%	94,44%	118.05 %
Rata-Rata				104.52%

Tabel 3.2 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2019	Realisasi	
			2018	2019
Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolanan dan Kerjasama	Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluarkan (%)	80%	80,49%	81.30%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi (IKM)	99	98,82	98,82

	Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan (IKM)	97	94,40	95,65
	Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti (%)	80%	95.17%	94,44%

Tabel 3.3 : Perbandingan Realisasi Kinerja Akhir Periode Renstra 2014-2019

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama	Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluarkan (%)	80	81.30%	101,62%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi (IKM)	99	98,82	99,82%
	Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan (IKM)	97	95,65	98,60%
	Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti (%)	80	94.44%	118.05%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Analisis Capaian Kinerja Indikator 1

Indikator 1 : Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluarkan

Monitoring Berita Media Cetak atau selanjutnya disebut Monitoring Media adalah kegiatan pemantauan berita-berita tentang isu aktual pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Media Cetak/Online. Kegiatan Monitoring Media ini bertujuan untuk :

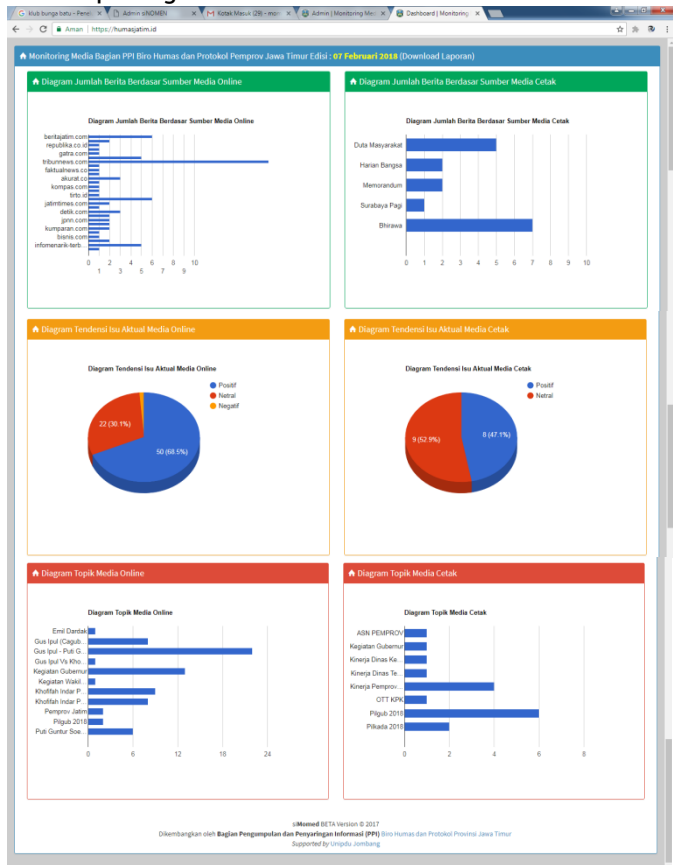
- a. Menyediakan informasi aktual pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang berkembang di masyarakat kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah secara cepat dan efisien;
- b. Memberikan pertimbangan informatif kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah agar dapat melakukan tindakan preventif dan sesegera mungkin menindaklanjuti atas berita negatif dan atau informasi yang tidak tepat di masyarakat melalui media cetak agar tidak semakin tersebar luas;
- c. Mendokumentasikan berita media cetak dalam bentuk kliping dan mencatat statement pejabat/narasumber terkait yang dapat digunakan sebagai rujukan informasi dalam rangka pencegahan permasalahan informasi terkait pemerintahan Provinsi Jawa Timur di kemudian hari.

Monitoring Media pada Media Cetak tersebut dilakukan setiap pagi hari kerja terhadap 210 Media Online dan 15 Media Cetak yang terbit harian. Adapun media cetak yang dimonitoring adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| a. Jawa Pos | h. Bhirawa |
| b. Surya | i. Radar Surabaya |
| c. Harian Bangsa | j. Memorandum |
| d. Duta Masyarakat | k. Koran Sindo |
| e. Surabaya Pagi | l. Media Indonesia |
| f. Kompas | m. Bisnis Indonesia |
| g. Republika | |

Monitoring Media dilaksanakan oleh Analis Berita yang terbentuk dalam satu tim. Hasil Monitoring Media berupa Dokumen Monitoring Media Cetak dan Online Harian yang berisi hasil analisis berita dan tanggapan tokoh/pejabat/narasumber lainnya terkait dengan isu aktual pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2017, Biro Humas dan Protokol meluncurkan sebuah inovasi dalam pelaksanaan Monitoring Media, yaitu dengan membangun sebuah Sistem Informasi Monitoring Media (SiMomed) berbasis website online sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 3.1 : Tampilan Sistem Informasi Monitoring Media (SiMomed) Biro Humas dan Protokol

Melalui SiMomed tersebut, analis berita dapat melakukan monitoring media lebih mudah dan cepat, serta hasilnya dapat dilihat secara online oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait perkembangan isu publik di Jawa Timur. Analis berita juga dapat menghasilkan laporan Monitoring Media secara otomatis melalui SiMomed, laporan tersebut selanjutnya dihimpun menjadi Dokumen Monitoring Media.

Dokumen Monitoring Media setiap harinya disediakan untuk pejabat tinggi di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang berkepentingan, yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum.

Apabila terdapat berita media cetak yang perlu ditindaklanjuti atau diklarifikasi, maka Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum memberikan disposisi pada dokumen monitoring dimaksud. Disposisi tersebut kemudian ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai disposisi dimaksud.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator 1

INDIKATOR KINERJA	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian	Realisasi		
				2018	2017	2016
Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluarkan	80%	81.30%	101,62 %	80.4 9%	114,8 7 %	75,10 %

Capaian Kinerja Biro Humas dan Protokol untuk indikator 1 pada tahun 2019 dari target indeks kepuasan 80 % terealisasi sebesar 80,41 % atau tercapai 114,87 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah Dokumen Monitoring Media Tahun 2019 : 246
- Jumlah Dokumen Monitoring yang Ditindaklanjuti : 200

Prosentase
Monitoring Berita
Media Cetak
Tentang Isu Aktual
Pemerintahan
Provinsi Jawa Timur
yang ditindaklanjuti

$$= \frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut}}{\text{Jumlah Dokumen Monitoring}} \times 100\%$$
$$= \frac{200}{246} \times 100\% = \mathbf{81,30\%}$$



Kerjasama Monitoring Media dengan PT Antara Insight (LKBN Antara) untuk memetakan dan menganalisa penyebaran informasi publik terkait Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dimulai sejak tahun 2018.



Infografis pembangunan Provinsi Jawa Timur disusun dan diterbitkan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring media. Infografis ini diterbitkan secara tematik berdasarkan agenda isu publik guna memberikan informasi awal kepada masyarakat atas capaian pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada topik isu publik terkait.



Buku Himpunan Kliping Media Cetak disusun berdasarkan kelompok program utama pemerintah dan isu-isu publik terkait, diterbitkan setiap bulan dengan tiga kategori : Ekonomi dan Pembangunan, Pemerintahan dan Umum serta Kesejahteraan Masyarakat.





Sebagai upaya dalam memberikan pemahaman kepada semua stakeholders, baik di internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun diluar Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan isu-isu publik yang beredar di masyarakat, maka sebagai tindak lanjut kegiatan monitoring medai dilakukan berbagai pertemuan dengan stakeholders melalaui forum-forum kehumasan lintas sektor.

2. Analisis Capaian Kinerja Indikator 2

Indikator 2 : **Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi**

Informasi kegiatan dan kebijakan Gubernur, Wagub dan Sekda yang disampaikan secara luas melalui media online memiliki pengaruh sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebab, ketersebaran informasi kegiatan dan kebijakan menjadi hal mutlak sebuah pemerintahan agar mendapatkan dukungan dari masyarakat luas.

Disamping itu perkembangan teknologi dan kondisi masyarakat saat ini telah mengarah pada masyarakat modern yang dinamis, sebagian besar masyarakat dari berbagai lapisan telah menjadi masyarakat yang dekat dengan teknologi informasi, terbukti dengan dimilikinya perangkat *handphone/smartphone* yang mendukung akses informasi lebih cepat dan luas melalui media website.

Penyampaian informasi melalui website Biro Humas dan Protokol telah didukung oleh tersedianya insfrabuktur teknologi informasi (TI) dan pegawai yang memiliki latar belakang keilmuan bidang TI, setidaknya pegawai dengan bidang keilmuan TI terdapat pada setiap bagian. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan di era reformasi birokrasi dan perwujudan pelayanan publik yang baik bahwa penyedia informasi hendaknya bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan dan relevan. Untuk itu, secara umum masyarakat banyak yang mengakses Website Biro Humas dan Protokol melalui <http://www.birohumas.jatimprov.go.id>



Gambar 3.2 Tampilan Website Biro Humas dan Protokol

Upaya perbaikan agar lebih menarik minat masyarakat untuk mengakes website dan untuk meningkatkan jumlah pengunjung website puas, maka Biro Humas dan Protokol di tahun 2019 telah melakukan beberapa upaya, diantaranya;

1. Merancang ulang tampilan website agar terlihat lebih dinamis dan menarik, termasuk dengan mengatur tata letak setiap konten, baik informasi statis maupun berita kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Menambahkan informasi Agenda Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Provinsi Jawa Timur. Upaya ini merupakan bentuk transparansi informasi kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui jadwal kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Provinsi Jawa Timur setiap harinya.
3. Menampilkan berita Kegiatan Kepala Daerah Kab/Kota se Jawa Timur berdasarkan Kota/Kabupaten tempat kegiatan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur terhadap kegiatan kehumasan di daerah, disamping itu juga agar masyarakat luas mengetahui berita daerah melalui website Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur

4. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kualitas SDM bagi karyawan Biro Humas dan Protokol khususnya bagian Media dan Dokumentasi di bidang penulisan berita. Diharapkan melalui pelatihan tersebut konten informasi dan berita menyangkut kegiatan/kebijakan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Provinsi Jawa Timur yang dimuat melalui website dan media lainnya semakin informatif dan relevan.



Gambar 3.3 Pelayanan Kehumasan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretrais Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



Gambar 3.4 Suasana Kegiatan Hubungan Media Massa Tahun 2019

Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah adalah pimpinan dan pengambil kebijakan diberbagai sektor di daerah wilayah kerjanya, selain itu sebagai Gubernur bersama Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah harus menjadi contoh, dipercaya masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Sehingga kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

harus disebarluaskan melalui berbagai media, baik media cetak maupun elektronik agar masyarakat mengetahui secara pasti kebijakan, statement dan perhatiannya kepada masyarakat.

Dalam rangka penyebarluasan berita dan informasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Humas dan Protokol menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai media-media massa. Hingga saat ini media-media massa tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.7 *Media Partner* Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jatim Tahun 2019

No	Nama Media	Jenis Media	Bentuk Kerjasama
1	JAWA POS	Cetak	Public Expose
2	SURYA	Cetak	Public Expose
3	MEMORANDUM	Cetak	Public Expose
4	BHIRAWA	Cetak	Public Expose
5	KORAN SINDO	Cetak	Public Expose
6	RADAR SURABAYA	Cetak	Public Expose
7	RADAR BROMO	Cetak	Public Expose
8	HARIAN BANGSA	Cetak	Public Expose
9	MEDIA INDONESIA	Cetak	Public Expose
10	SURABAYA POST	Cetak	Public Expose
11	SURABAYA PAGI	Cetak	Public Expose
12	DUTA MASYARAKAT	Cetak	Public Expose
13	BIDIK	Cetak	Public Expose
14	BIDIK NASIONAL	Cetak	Public Expose
15	INDOMARITIM	Cetak	Public Expose
16	SAPUJAGAT	Cetak	Public Expose
17	NEWSWEEK	Cetak	Public Expose
18	JATIM POS	Cetak	Public Expose

No	Nama Media	Jenis Media	Bentuk Kerjasama
19	DOR	Cetak	Public Expose
20	SUKSESI	Cetak	Public Expose
21	INVESTIGASI	Cetak	Public Expose
22	LINTAS SURABAYA	Cetak	Public Expose
23	PEDULI RAKYAT	Cetak	Public Expose
24	TEDUH	Cetak	Public Expose
25	BERITA METRO	Cetak	Public Expose
26	DJEMBATAN MERAH	Cetak	Public Expose
27	PRO M	Cetak	Public Expose
28	KHARISMA	Cetak	Public Expose
29	SUARA MEDIA NASIONAL	Cetak	Public Expose
30	SUARA NASIONAL	Cetak	Public Expose
31	MALANG POST	Cetak	Public Expose
32	PERAK POS	Cetak	Public Expose
33	DERAP DESA	Cetak / Majalah	Public Expose
34	MAJALAH GEO	Cetak / Majalah	Public Expose
35	MAJALAH AINA	Cetak / Majalah	Public Expose
36	MAJALAH KIRANA	Cetak / Majalah	Public Expose
37	FAKTA	Cetak / Majalah	Public Expose
38	MAJALAH DUMAS	Cetak / Majalah	Public Expose
39	LENSA INDONESIA	Cetak dan Online	Public Expose
40	BERITA LIMA	Cetak dan Online	Public Expose
41	TVRI	Elektronik / TV	Iklan Layanan Masyarakat, Penayangan dan Kaleidoskop

42	RRI	Elektronik / Radio	Iklan Layanan Masyarakat, Penayangan dan Kaleidoskop
43	JTV	Elektronik / TV	Iklan Layanan Masyarakat, Penayangan dan Kaleidoskop
44	SBO TV	Elektronik / TV	Penayangan
45	METRO TV	Elektronik / TV	Penayangan

Hubungan yang baik antara pemerintah daerah dengan media massa sudah menjadi suatu keharusan, sebab derasnya aliran informasi dan kebebasan pers disisi lain menjadi ancaman tersendiri bagi pemerintah daerah. Sebagai upaya penyeimbangan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tmur dengan Pemerintah Daerah dan kalangan Pers, maka Biro Humas dan Protokol di tahun 2016 menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Rakor Kehumasan, yaitu Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur bersama dengan Bagian Humas Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Rakor kehumasan diselenggarakan satu tahun satu kali, sebagai upaya menjalin kerjasama yang baik dalam pertukaran dan penyebarluasan informasi, baik di bidang pemerintahan. ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
2. *Pers Gathering* dan *Editor Gathering*, yaitu pertemuan antara Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dengan wartawan dan redaksi. *Pers Gathering* diselenggarakan setiap satu bulan dua kali dan *Editor Gathering* satu kali di akhir bulan.
3. *Pers Tour* dan *Lomba Karta Tulis Wartawan (LKTW)*, kegiatan ini merupakan upaya menjalin kebersamaan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kalangan pers/media. Kegiatan ini dilaksanakan satu tahun sekali dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Jawa Timur. Karya Tulis Wartawan dinilai

berdasarkan berita yang ditulis wartawan tentang pembangunan di Jawa timur yang dimuat di media.



Gambar 3.5 Rapat Koordinasi Kehumasan dengan Kab/Kota Se-Jawa Timur



Gambar 3.6 Rapat Koordinasi Teknis Kehumasan
Bagi OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur



Kamis, 31 Oktober 2019

HarianBhirawa.com
Waktu Rakyat, Negeri Kita

SEARCH AND ENTER

BERANDA UTAMA EKSEKUTIF **JATIM MEMBANGUN** ERBIS PELAYANAN PUBLIK PENDIDIKAN OPINI NASIONAL INDEKS

Home / Indeks / Jatim Membangun / Surabaya / Wartawan Bhirawa Juara I Lomba Karya Jurnalistik Pemprov

Wartawan Bhirawa Juara I Lomba Karya Jurnalistik Pemprov

Author by Helmi Supriatno Posted on 11/10/2018

Pemprov Jatim, Bhirawa
Wartawan Harian Bhirawa Zenal बाद sukses meraih Juara I dalam Lomba Karya Tulis Wartawan (LKTW) Pemprov Jatim 2018. Penghargaan yang cukup bergengsi melengkapi penghargaan-penghargaan lainnya tulis jurnalistik yang setiap tahun selalu...

Related

- Keuang Jatim Gie Marwin Juara Protes Lurah K...
- Roboropt Kabupaten...
- Keang Komunitas...

category/nasional

Varisi Cetak

Edisi 30 Oktober 2019

Edisi 28 Oktober 2019

Profil Harian Bhirawa

Company Profile

00:00 00:00

Gambar 3.7 Lomba Karya Tulis Wartawan (LKTW) Tahun 2019

Outcome yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan tersebut dan sekaligus sebagai dampak tidak langsungnya adalah meningkatnya jumlah berita kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang dimuat di media massa. Hal ini sesuai dengan kebuakan mengoptimalkan pemanfaatan media masa serta media kemasyarakatan lainnya untuk mempercepat arus informasi dalam mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan,

Adapun rincian jumlah rilis berita dan yang ditindaklanjuti media massa tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.9 : Distribusi Berita Kegiatan Gubernur, Wagub dan Sekda 2019

No	Kategori Berita	Jumlah Rilis	Dimuat Media Massa
1	Kegiatan Gubernur	270	259
2	Kegiatan Wakil Gubernur	251	248
3	Kegiatan Sekretaris Daerah	42	36
Jumlah Total		563	543
Prosentase		96.44%	

Penurunan dan Peningkatan yang terjadi dari tahun ke tahun memang tidak terlalu signifikan, sebab *baseline*/kondisi awal sudah cukup tinggi, dan kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara Pemerintah provinsi Jawa Timur dengan Pers/Media Massa sudah baik. Namun, program-program penunjang pencapaian target kinerja harus tetap dilakukan, agar hubungan baik tersebut tetap terjaga dan semakin baik.

Produk Informasi adalah informasi yang dikemas menjadi sebuah produk yang dapat dibaca, disadur dan dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Produk informasi yang dimaksud berupa *release* dan/atau terbitan berkala. Sebagai bentuk penyebaran informasi yang telah

dihimpun, Biro Humas dan Protokol menghasilkan beberapa produk informasi sebagai berikut:

- a. Monitoring Harian terhadap Isu Aktual Media Cetak tentang Ekonomi, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, Pemerintahan dan Umum;
- b. Himpunan Kliping Bulanan;
- c. Himpunan Kliping Tahunan;
- d. Majalah Prasetya (Bulanan);
- e. Buku Himpunan Pidato Gubernur;
- f. Buku Himpunan Pidato Wagub dan Sekda;
- g. Buku Himpunan Foto Gubernur;
- h. Buku Himpunan Foto Wakil Gubernur; dan
- i. Tayangan Kaleideskop.

Produk informasi tersebut kemudian disebarluaskan dan didistribusikan kepada masing-masing pemangku kepentingan dengan rincian sebagai berikut:

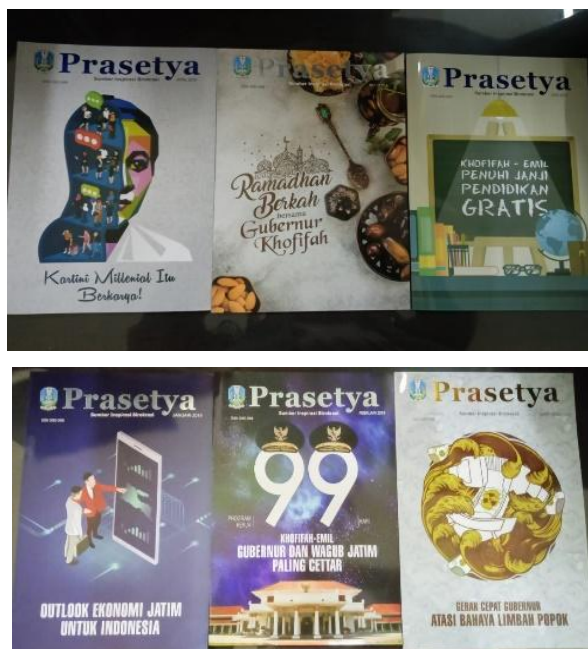
Tabel 3.10 Distribusi Produk Informasi Biro Humas dan Protokol

No	Jenis Produk Informasi	Jumlah Produksi	Dikirim Kepada	Jumlah Penerima	Frekuensi
1	Hasil Analisis Monitoring Media (Isu Aktual Media Cetak dan Online)	3 Set	Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	3	Harian
2	Himpunan Kliping Media Cetak Bulanan Kategori : a. Ekonomi b. Kesejahteraan Rakyat c. Pemerintahan dan Umum	180 Buku	OPD Provinsi Jawa Timur	60	Bulanan
3	Himpunan Kliping Media Cetak Tahunan : a. Gubernur b. Wakil Gubernur c. Sekretaris Daerah	600 Buku	OPD Prov Jatim, PTN se-Jatim, PTS se-Surabaya, Kab/Kota se-Jatim, Gubernur se-Indonesia	200	Tahunan

No	Jenis Produk Informasi	Jumlah Produksi	Dikirim Kepada	Jumlah Penerima	Frekuensi
4	Majalah Prasetya	1500 Majalah	OPD Prov Jatim, Kab/Kota se-Jatim, Gubernur se-Indonesia, Perwakilan Negara Sahabat	150	Bulanan
5	Buku Himpunan Pidato Gubernur	500 Buku	OPD Prov Jatim, Kab/Kota se-Jatim, Gubernur se-Indonesia	131	Tahunan
6	Buku Himpunan Pidato Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	470 Buku	OPD Prov Jatim, Kab/Kota se-Jatim, Gubernur se-Indonesia	131	Tahunan
7	Buku Himpunan Foto Kegiatan Gubernur	500 Buku	OPD Prov Jatim, Kab/Kota se-Jatim, Gubernur se-Indonesia	131	Tahunan
8	Buku Himpunan Foto Wakil Gubernur	470 Buku	OPD Prov Jatim, Kab/Kota se-Jatim, Gubernur se-Indonesia	131	Tahunan
9	Tayangan Potensi Hasil Pembangunan	14 Tayangan	TVRI, RRI	14	Triwulanan
10	Tayangan Kaleidoskop	9 Tayangan	TVRI, JTV, RRI	9	Tahunan



Gambar 3.8 Buku Himpunan Kliping Terbitan Biro Humas dan Protokol



Gambar 3.9 Majalah Prasetya dan Himpunan Foto Terbitan Biro Humas dan Protokol

Capaian kinerja Indikator 2 diukur berdasarkan kepuasan penerima produk informasi terhadap kualitas produk informasi yang diterima. Kualitas Produk Informasi tersebut diukur dari beberapa aspek, baik aspek kemasan maupun isi. Hasil pengukuran capaian kinerja Indikator 2 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator 2

INDIKATOR KINERJA	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian	Realisasi		
				2018	2017	2016
Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi	IKM = 99	98.82	99,82%	98.82	98,09	97.29

Pada Tahun 2016, Indeks Kepuasan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang puas terhadap produk informasi yang disampaikan bernilai 97,29, Tahun 2017 sebesar 98,09 dan Tahun 2018 naik menjadi 98,82. Pada tahun 2019 indeks kepuasan penerima produk informasi sebesar ditargetkan 99 dan capaiannya sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 98,82. Adapun pengukuran kinerja untuk indikator 2 di Tahun 2019 dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja Indikator 2 Tahun 2019

Jenis Pengukuran	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Instumen Penilaian	: Kuesioner
Jumlah Unsur Penilaian	: 5 Unsur
Responden	: OPD se-Provinsi Jawa Timur, Kab/Kota se-Jawa Timur, Provinsi se-Indonesia
Jumlah Responden	: 131 responden
Waktu Penilaian	: Januari sd. Desember 2019
Skala Penilaian	: Ordinal (4 orde)

Tabel 3.12 Profil Responden IKM Indikator 2

No	Jenis Penerima	Jumlah	%
1	OPD Prov Jatim	60	45,8%
2	Kab/Kota Se-Jatim	38	29%
3	Provinsi	33	25,2%
<i>Total</i>		131	100%

Tabel 3.13 : Tabulasi dan Perhitungan IKM Hasil Kuesioner Indikator 2

No. Unsur	Pertanyaan Kuesioner	Jumlah Nilai Per-Unsur	Rata2 Nilai Per Unsur	Index (Pembagi 0,2)
U1	Bagaimana pendapat saudara tentang kedisiplinan petugas kami dalam mengirim/menyampaikan produk informasi ?	518	3,95	0,79
U2	Menurut saudara, apakah produk dan konten informasi yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkan?	523	3,99	0,80
U3	Bagaimanakah kemampuan petugas dalam menyediakan, mengemas dan menyajikan informasi kepada saudara?	520	3,97	0,79
U4	Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan pelayanan informasi yang diberikan oleh petugas kami?	518	3,95	0,79
U5	Apakah anda mengetahui jadwal penerbitan dan pengiriman produk informasi dari petugas kami?	510	3,89	0,78
Jumlah Nilai Indeks				3,95
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (x25)				98,82

Keterangan

- a. Jumlah Nilai Per-Unsur : Jumlah nilai untuk setiap pertanyaan kuesioner dengan 131 responden dan skala penilaian 1 sd 4

- b. Rata-rata Nilai Per-Unsur : Jumlah Nilai Per-Unsur dibagi (/) Jumlah Responden
- c. Pembagi Tertimbang : 1 dibagi (/) jumlah unsur = 0, 2
- d. Indeks Per Unsur : Rata-rata Nilai Per-Unsur dikali (x) Pembagi Tertimbang

3. Analisis Capaian Kinerja Indikator 3

Indikator 3 : **Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan**

Salah satu tugas Biro Humas dan Protokol yang diamanatkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kebijakan pelayanan keprotokolan pimpinan, tata acara dan pelayanan tamu. Disamping itu melalui Bagian Protokol, Biro Humas dan Protokol berfungsi sebagai pelaksana acara penerimaan kunjungan tamu VIP/VVIP dan tamu lainnya ke pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pelayanan tamu kenegaraan terbagi dalam 2 (dua) jenis layanan yakni pelayanan tamu WIP dan VIP. Tamu WIP adalah presiden dan Wakil presiden, sedangkan tamu VIP terdiri dari:

- a. Ketua/Anggota MPR-RI;
- b. Ketua/Anggota DPR-RI;
- c. Ketua/Anggota DPD-RI;
- d. Menteri Kabinet;
- e. Pimpinan Lembaga Tinggi Negara; dan
- f. Duta Besar Negara Sahabat;

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan terhadap tamu kenegaraan yang berkunjung ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada Tahun 2018 Biro Humas dan Protokol menyelenggarakan kegiatan Rapat

Koordinasi Keprotokolan yang secara rutin diselenggarakan satu tahun satu kali. Rapat Koordinasi Keprotokolan adalah pertemuan antara protokol Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Protokol Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang berguna untuk memantapkan program-program keprotolan dan menyatukan visi terhadap pelayanan tamu kenegaraan yang berkunjung ke Jawa Timur.



Kegiatan Pelayanan Keprotokolan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur



Kegiatan Pelayanan Keprotokolan Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Tamu Negara

Pengukuran kinerja Indikator 3 dilakukan dengan cara survey terhadap kepuasan para tamu kenegaraan yang berkunjung ke Jawa Timur, baik tamu VIP maupun tamu WIP, termasuk kunjungan langsung maupun fasilitasi. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.14 *Capaian Kinerja Indikator 3*

INDIKATOR KINERJA	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian	Realisasi		
				2018	2017	2016
Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan	IKM = 97	95,65	98.60%	94,40	92,13	88,15

Dari Tabel 3.14 diketahui bahwa pada tahun 2016 Indeks OPD Penerima Layanan Keprotokolan yang puas terhadap pelayanan keprotokolan sebesar 88,15 dan Tahun 2017 sebesar 92,13. Sedangkan di Tahun 2018 Indeks tamu kenegaraan yang puas terhadap pelayanan keprotokolan mencapai 94,40 dan pada tahun 2019 realisasi indikator 3 sebesar . Fluktuasi realisasi indikator 3 (prosentase tamu kenegaraan yang puas terhadap pelayanan keprotokolan) tidak terlalu besar, kondisi ini dikarenakan Kunjungan tamu kenegaraan yang mendadak dan sering berubahnya agenda kunjungan.

Sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 610 Kegiatan Keprotokolan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta 217 kunjungan tamu kenegaraan ke Provinsi Jawa Timur, dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 3.15 Jumlah Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda Tahun 2019

No	Jenis Tamu	Jumlah	Sampel IKM	Prosentase
1	Gubernur	328	100	30,48 %
2	Wakil Gubernur	241	100	41,49 %
3	Sekretaris Daerah	41	41	100 %
Total		610	241	39,50 %

Tabel 3.16 Jumlah Kunjungan Tamu Kenegaraan Tahun 2019

No	Jenis Tamu	Jumlah	Sampel IKM	Prosentase
1	Tamu VIP	188	50	26,59 %
2	Tamu VVIP	29	20	29,00 %
Total		217	60	36,16 %

Adapun pengukuran kinerja indikator 3 di Tahun 2019 menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja Indikator 3 Tahun 2019

Jenis Pengukuran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 Instrumen Penilaian : Kuesioner
 Jumlah Unsur Penilaian : 12 Unsur
 Responden : OPD/Instansi Penerima Layanan
 Keprotokolan Gubernur/Wakil
 Gubernur/Sekretaris Daerah dan Tamu
 Kenegaraan VIP dan WIP Tahun 2018
 Jumlah Responden : 360 Responden
 Waktu Penilaian : Januari sd. Desember 2019
 Skala Penilaian : Ordinal (4 orde)

Tabel 3.17 : Tabulasi dan Perhitungan IKM Hasil Kuesioner 3

No. Unsur	Pertanyaan Kuesioner	Jumlah Nilai Per-Unsur	Rata2 Nilai Per Unsur	Index (Pembagi 0,08)
U1	Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?	1325	3,68	0,31
U2	Bagaimana pendapat saudara tentang kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?	1318	3,66	0,31
U3	Bagaimana pendapat saudara tentang kejelasan dan kepastian petugas yang melayani?	1407	3,91	0,33
U4	Bagaimana pendapat saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan?	1412	3,92	0,33

No. Unsur	Pertanyaan Kuesioner	Jumlah Nilai Per-Unsur	Rata2 Nilai Per Unsur	Index (Pembagi 0,08)
U5	Bagaimana pendapat saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan?	1373	3,81	0,32
U6	Bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?	1392	3,87	0,32
U7	Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan pelanan di unit ini?	1375	3,82	0,32
U8	Bagaimana pendapat saudara tentang keadilan untuk mendapatkan pelayanan disini?	1383	3,84	0,32
U9	Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam meberikan pelayanan?	1361	3,78	0,32
U10	Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan?	1370	3,81	0,32
U11	Bagaimana pendapat saudara tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan?	1279	3,55	0,30
U12	Bagaimana pendapat saudara tentang keamanan pelayanan di unit ini?	1317	3,66	0,30
Jumlah Nilai Indeks				3,82
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (x25)				95,65

Keterangan

- a. Jumlah Nilai Per-Unsur : Jumlah nilai untuk setiap pertanyaan kuesioner dengan 414 responden dan skala penilaian 1 sd 4
- b. Rata-rata Nilai Per-Unsur : Jumlah Nilai Per-Unsur dibagi (/) Jumlah Responden
- c. Pembagi Tertimbang : 1 (satu) dibagi (/) jumlah unsur 12 = 0,08
- d. Indeks Per Unsur : Rata-rata Nilai Per-Unsur dikali (x) Pembagi Tertimbang

4. Analisis Capaian Kinerja Indikator 4

Indikator 4 : **Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan**

Fungsi baru Biro Humas dan Protokol yang diamanatkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah Fungsi Administrasi Kerjasama. Pengukuran Kinerja Indikator 4 dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pada tahun 2017 realisasi indikator 4 sebesar 90.34% dan pada tahun 2018 naik menjadi 95.17% dari target sebesar 75% atau capaian indikator 4 pada tahun kedua tercatat 126,89%. Capaian yang terhitung tinggi ini disebabkan pada tahun 2018, secara struktural dan fungsi, Bagian Administrasi Kerjasama telah mendapatkan dukungan anggaran secara penuh sehingga dapat memaksimalkan fungsinya sebagai fasilitator terlaksananya kerjasama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Capaian Indikator kinerja 4 Tahun 2018 dihitung berdasarkan data sebagai berikut :

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator 4 Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2017
Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti	80 %	94,44%	118.05 %	95,17 %	90,34 %

Sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 144 Kegiatan Administrasi Kerjasama dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.19 Jumlah Tindaklanjut Dokumen Administrasi Kerjasama Tahun 2019

No	Jenis Dokumen Administrasi Kerjasama	Jumlah Dokumen Administrasi Kerjasama	Tindaklanjut	Prosentase Tindaklanjut
1	Luar Negeri	2	1	50,00 %
2	Dalam Negeri	132	128	96,97 %
3	Monitoring dan Evaluasi	10	7	70,00 %
Total		144	136	94,44 %





Kegiatan-kegiatan bidang kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik dengan mitra dalam maupun luar negeri.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara legal dan akuntabel, melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan mengacu dan memperhatikan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mensinkronkan dengan ketentuan yang lebih tinggi dengan karakter dan kebutuhan daerah secara teknis pengelolaan keuangan daerah harus dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E), pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kerugian daerah, pengelolaan keuangan BUMD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA).

2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 132 tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019. Sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 132 tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019, komposisi APBD Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 untuk penyelenggaraan 8 (Delapan) program dan 21 Kegiatan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur, telah dialokasikan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 termasuk APBD Perubahan Tahun 2019 sebesar **Rp 55.902.899.000,-**

Dari total APBD Tahun 2019 sebesar **Rp 55.902.899.000,-** yang dialokasikan pada Biro Humas dan Protokol dapat dirinci berdasarkan jenis belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung (BTL) **Rp 10.776.004.000,-**
- b. Belanja Langsung Program/Kegiatan **Rp 45.126.895.000,-**
 - b.1 Belanja Rutin : Rp 1.840.520.000.-
 - b.2 Belanja Pembangunan : Rp 43.286.375.000,-

Tabel 3.20 : Alokasi Anggaran (Belanja Pembangunan) Per Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2019

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	APBD Tahun Anggaran 2018		
		Program	Rp	Persentase
Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama	Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluarkan	Program Peningkatan Kualitas Ketersediaan Informasi	7.016.495.375	16,20%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi	Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi	14.816.894.316	34,23%
	Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	12.767.545.000	29,49%
	Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti	Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Administrasi Kerjasama	8.685.440.309	20,06 %
Rata-Rata			43.286.375.000	100,00%

Tabel 3.20 tersebut menunjukkan bahwa guna mencapai 1 (satu) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, Biro Humas dan Protokol mengalokasikan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 43.286.375.000,-** dengan pembagian yang cukup proporsional sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan Biro Humas dan Protokol. Dengan rincian per kegiatan sebagaimana dalam Tabel 3.21 sebagai berikut :

Tabel 3.21 : Alokasi Anggaran Per Kegiatan IKU Tahun Anggaran 2019

Indikator Sasaran	Kegiatan		Rp
	Program		
Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluarkan	Program Peningkatan Kualitas Ketersediaan Informasi 7.016.495.375	Monitoring Media Massa dan Penyebarluasan hasil Analisis Berita dan Isu Publik Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	1.616.200.000
		Pengumpulan dan Pengolahan Data/Informasi Pendukung Kebijakan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	1.299.390.000
		Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Kehumasan dan Keprotokolan	4.100.905.375
Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi	Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi 14.816.894.316	Penyebarluasan Informasi Kebijakan dan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	525.370.000
		Pembinaan dan keikutsertaan Lembaga Pers	9.440.086.000
		Pendokumentasian Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta Olah Konten Multimedia	3.573.410.000
		Penerbitan dan Penyebarluasan Produk Informasi/Dokumentasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	1.278.028.316
Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan 12.767.545.000	Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	9.279.585.000
		Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu Negara	2.169.530.000
		Pelayanan Pengadaan Undangan Resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokolan	1.318.430.000

Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti	Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Administrasi Kerjasama 8.685.440.309	Hubungan Luar Negeri	5.955.897.637
		Hubungan Dalam Negeri	1.535.542.672
		Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	1.194.000.000
			43.286.375.000

Alokasi anggaran terbesar digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja 2 Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi sebesar 34,23% yaitu melalui penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan keikutsertaan Lembaga Pers, kemudian disusul kegiatan Pendokumentasian Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta Olah Konten Multimedia sebesar 9,86%. Kegiatan ini memiliki output berupa Release Berita Media Cetak, Public Expose, Advertorial, Pers Gathering, Editor Gathering dan Lomba Karya Tulis Wartawan (LKTW).

Indikator Kinerja 3 dengan kegiatan Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dialokasikan anggaran sebesar 29,49%, Kegiatan Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu Negara sebesar 3,88% dan Kegiatan Pelayanan Pengadaan Undangan Resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokolan dialokasikan anggaran sebesar 3,05%. Selanjutnya, untuk mencapai target Indikator Kinerja 4 dialokasikan anggaran sebesar 20,06% untuk kegiatan Hubungan Luar Negeri, 2,98% untuk Kegiatan Hubungan Dalam Negeri dan 1,88% untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama.

Berikutnya untuk mencapai target indikator 1 dialokasikan anggaran sebesar 16,20% untuk kegiatan Monitoring Media Massa dan Penyebarluasan hasil Analisis Berita dan Isu Publik Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data/Informasi

Pendukung Kebijakan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebesar 4,84% dan untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Kehumasan dan Keprotokolan dialokasikan anggaran sebesar 2,28%.

Adapun serapan anggaran berdasarkan Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.22 berikut :

Tabel 3.22 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019

Program	APBD Tahun Anggaran 2019			
	ANGGARAN		REALISASI	
	Rp	Persentase	Rp	Persentase
Program Peningkatan Kualitas Ketersediaan Informasi	7.016.495.375	16,20%	7.000.989.149	15,95%
Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi	14.816.894.316	34,23%	11.732.296.000	32,80%
Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	12.767.545.000	29,49%	10.775.515.200	25,61%
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Administrasi Kerjasama	8.685.440.309	20,06 %	5.402.304.061	16,71%
Jumlah	43.286.375.000	100,00%	39.485.831.275	91,22%

Tabel 3.23 : Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2019			Anggaran 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama	Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluarkan	80%	81.30%	101,62%	16,20%	15,95%	98.45%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi	IKM 99	98,82	99,82%	34,23%	32,80%	95.82%
	Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan	IKM 97	95,65	98.60%	29,49%	25,61%	86,84%
	Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti	80%	94,44%	118.05 %	20,06 %	16,71%	83.30%
Rata-Rata				104.52%			91,10%

Berdasarkan Tabel 3.23 tersebut, diketahui bahwa Rata-Rata Capaian Kinerja Biro Humas dan Protokol pada tahun 2019 adalah sebesar 104,52% dengan Rata-Rata Capaian Serapan Anggaran sebesar 91,10 %. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi efisiensi kinerja sebesar 13,42 % atau dengan kata lain Biro Humas dan Protokol telah melakukan efisiensi anggaran untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Uraian efisiensi kinerja tiap Indikator Kinerja Utama yang telah dilakukan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.24 sebagai berikut:

Tabel 3.24 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Efisiensi Sumber Daya 2019		
		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama	Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluarkan	101,62%	98,45%	3,17%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi	99,82%	95,82%	4%
	Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan	98,60%	86,84%	7.76%
	Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti	118,05 %	83,30%	34.75%
Rata-Rata		106,67%	91,10%	13,42%

BAB IV P E N U T U P

Sebagai penjabaran teknis dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Humas dan Protokol Tahun 2014-2019 disusun sebagai pendukung tercapainya Misi ke-4 RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 “*Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*”. Renstra tersebut kemudian diuraikan kedalam Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Humas dan Protokol Tahun 2019, sehingga misi ke-4 RPJMD Provinsi Jawa Timur dapat terwujud. Disamping itu, LKjIP Biro Humas dan Protokol tahun 2019 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Biro Humas dan Protokol, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator dari setiap sasaran yang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 dikategorikan Sangat Baik, sebab persentase rata-rata capaian kinerja yang dihasilkan dari setiap indikator adalah 104,52% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2019

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokol dan Kerjasama	Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluarkan (%)	80%	81.30%	101,62%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi (IKM)	IKM 99	98,82	99,82%
	Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokol (IKM)	IKM 97	95,65	98.60%

	Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti (%)	80%	94,44%	118.05 %
Rata-Rata				104.52%

Beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala Biro Humas dan Protokol adalah sebagai berikut ;

1. Terjadi perubahan nomenklatur dan struktur Organisasi Perangkat Daerah bidang kehumasan dan keprotokolan di tingkat Kabupaten/Kota (Implementasi UU 23/2014 dan PP 18/2016);
2. Belum semua media massa memuat siaran pers yang diterbitkan oleh Biro Humas dan Protokol;
3. Tingginya frekuensi kegiatan/acara di Jawa Timur terutama kedatangan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tamu Negara serta kegiatan nasional yang tidak seimbang dengan jumlah petugas protokol, sehingga kegiatan tidak dapat terlayani dengan optimal;

Dari permasalahan tersebut, solusi / pemecahan masalah yang akan terus diupayakan oleh Biro Humas dan Protokol adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan penyamaan persepsi antara Biro Humas dan Protokol dengan Bagian Humas dan Protokol Kabupaten/Kota;
2. Mengintensifkan dan mengoptimalkan penyebarluasan informasi kepada media massa, termasuk portal berita online;
3. Melakukan peningkatan kompetensi petugas keprotokolan dan melakukan penambahan jumlah aparatur petugas keprotokolan.

Demikian Laporan Kinerja Biro Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2019 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kepala Biro Humas Dan Protokol



ARIES AGUNG PAEWAL, S.STP, MM.

Pembina Tk.I

NIP. 19760417 199511 1 001



Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Jl. Pahlawan No.110 Bubutan Surabaya Jawa Timur
<http://birohumas.jatimprov.go.id>